

Ilmuwan dan Tanggung Jawab Sosial Kaum Intelegensia

Oleh

Syamsuddin Haris

Sarjana, Ilmuwan, dan Intelegensia

- Sarjana secara umum dapat diartikan sebagai orang pandai, atau ahli ilmu pengetahuan, atau penyebutan suatu tingkat yang dicapai oleh seseorang yang telah menamatkan pendidikan terakhir di perguruan tinggi.
- Ilmuwan dapat mengandung arti orang yang ahli; orang yang banyak pengetahuan mengetahui suatu ilmu; orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan; orang yang bekerja dan mendalami ilmu pengetahuan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Jadi singkatnya, ilmuwan adalah seorang yang terlibat dalam kegiatan sistematis untuk memperoleh dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Ilmuwan dibatasi oleh keahlian dalam bidang ilmu tertentu.
- Intelektual mereka yang menggunakan kekuatan pikiran sehingga kita mengetahui atau memperoleh pengetahuan, menalar dan berfikir. Jadi, intelektual adalah mereka yang memikirkan fenomena alam dan manusia yang memanfaatkan buah pemikiran dan penelitian untuk mengubah kondisi masyarakat demi kebahagiaan dan kenyamanan hidup kolektif. Intelektual tidak dibatasi oleh bidang ilmu tertentu.
- Intelegensia atau Cendekiawan adalah komunitas para ilmuwan dan/atau intelektual yang jangkauan pemikirannya melintasi bidang ilmu mereka sendiri.

Tanggung Jawab Etis Ilmuwan (1)

- Semua ilmuwan yang memiliki kualifikasi di bidangnya, baik ilmuwan sosial maupun nonsosial, dituntut memiliki tanggung jawab terhadap ilmu yang dipahami dan dikuasainya. Tanggung jawab ilmuwan memiliki dua dimensi utama, yakni tanggung jawab ilmiah atau akademik di satu pihak, dan tanggung jawab etis di pihak lain. Tanggung jawab akademik mencakup kepatuhan terhadap segenap prosedur, standar, dan metode ilmiah yang seharusnya dipenuhi seorang ilmuwan sebelum merumuskan konsep, teori, atau pendekatan dalam rangka mencari kebenaran. Sedangkan tanggung jawab etis mencakup perhitungan dampak atau implikasi nonakademik dari setiap konsep, teori, atau pendekatan yang diimplementasikan dalam kehidupan kolektif.
- Implikasi nonakademik terbesar yang membutuhkan kalkulasi akademik dari para ilmuwan adalah dampak implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) bagi kehidupan sosial dan ekosistem alam beserta lingkungannya. Artinya sehebat, setinggi, dan secanggih apa pun produk iptek yang dihasilkan para ilmuwan, belum tentu layak diapresiasi jika tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Apalagi jika produk iptek tersebut justru semakin merusak kohesi, solidaritas, dan tatanan sosial, serta menghancurkan ekosistem alam beserta lingkungannya.

Tanggung Jawab Etis Ilmuwan (2)

- Ilmuwan sosial pada dasarnya memiliki tanggung jawab etis dan sosial yang lebih besar dari ilmuwan nonsosial. Faktor penting di balik realitas ini adalah fakta bahwa obyek sekaligus subyek ilmu-ilmu sosial adalah manusia itu sendiri, baik manusia sebagai individu yang berperilaku; manusia sebagai masyarakat yang strata sosialnya berbeda-beda; manusia sebagai entitas biologis sekaligus produk budaya dan tradisi; manusia sebagai makhluk sosial yang tidak pernah puas memenuhi kebutuhannya padahal sumber-sumber sangat terbatas; manusia sebagai makhluk sosial yang tidak pernah puas dengan alokasi nilai dan distribusi kekuasaan yang diperolehnya;
- Dalam kaitan ini, ilmuwan ekonomi misalnya dituntut untuk turut memiliki tanggung jawab etis agar sistem atau struktur ekonomi yang berlaku tidak bersifat eksploitatif bagi rakyat kecil, agar sumber-sumber, khususnya sumberdaya alam tidak dikuasai oleh segelintir pemodal besar. Di sisi lain, ilmuwan politik dituntut untuk turut memiliki tanggung jawab etis agar sistem politik yang berlaku tidak bersifat menindas dan hanya menguntungkan kelas penguasa, agar semua warganegara memiliki hak politik yang sama, agar tidak ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan seterusnya.

Tanggung Jawab Etis Ilmuwan (3)

- Apakah dengan demikian ilmu tidak bebas nilai? Secara umum berkembang dua perspektif, yakni ilmu itu bersifat bebas nilai (*value free*), dan ilmu tidak bebas nilai.
- Perspektif ilmu yang bersifat bebas nilai, menurut saya, lebih tepat dilekatkan bagi ilmu-ilmu nonsosial, atau ilmu-ilmu yang obyek kajiannya bukan manusia. Sedangkan ilmu-ilmu sosial yang obyek sekaligus subyek kajiannya adalah manusia itu sendiri, tidak sepenuhnya bebas nilai. Artinya, meskipun ilmu-ilmu sosial juga memiliki prosedur, standar, dan metode ilmiah yang baku dan obyektif, ilmuwan sosial tetap dituntut bertanggung jawab atas keselamatan manusia, alam, dan lingkungannya sebagai bagian dari tanggung jawab etisnya sebagai ilmuwan.
- Oleh karena itu pandangan akademis seorang ilmuwan sosial tidak semata-mata bersumber dari perspektif teori dan keilmuan yang dimilikinya, melainkan juga tidak jarang bertolak dari visi personal ilmuwan sosial tentang masyarakatnya berdasarkan perspektif sejarah, budaya, tradisi, dan pengalaman empiris individu, kelompok, sosial, dan masyarakat yang menjadi subyek kajiannya.

Ilmu Politik dan Fenomena Sosial (1)

- Sebagai contoh ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politics*. Secara sederhana, politik adalah upaya menggapai kehidupan bersama yang lebih baik. Politik bisa juga diartikan sebagai usaha untuk menentukan kebijakan yang dapat diterima oleh sebagian besar warga menuju kehidupan kolektif yang baik, adil dan harmonis. Termasuk proses mencapai tujuan dari sistem yang disepakati bersama dan bagaimana cara mencapainya;
- Dalam perspektif klasik, politik adalah suatu usaha mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik. Para filsuf Yunani Kuno memahami politik sebagai *virtue*, yakni berbuat kebajikan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama;
- Dalam perspektif baru, politik dalam suatu **negara** berkaitan dengan masalah **kekuasaan** (*power*), **pengambilan keputusan** (*decision making*), **kebijakan publik** (*public policy*), dan **alokasi** atau **distribusi** (*allocation or distribution*) nilai-nilai (*value*) dan sumber-sumber (*resources*) dalam masyarakat;

Ilmu Politik dan Fenomena Sosial (2)

- Untuk melaksanakan kebijakan umum terkait alokasi dan distribusi nilai dan sumber-sumber diperlukan kekuasaan yang *legitimate* agar kerjasama terbangun dan konflik terhindarkan. Karena itu politik dapat pula dilihat sebagai upaya penyelesaian konflik dan penciptaan konsensus dalam suatu masyarakat;
- Selain konsep-konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi nilai dan sumber-sumber, dalam ilmu politik dikenal pula konsep otoritas atau kewenangan (*authority*) dan legitimasi (*legitimacy*) atau keabsahan;
- Apabila kekuasaan itu absah atau memiliki legitimasi, konsep yang lazim digunakan adalah otoritas atau kewenangan. Konsep kekuasaan digunakan jika belum memiliki legitimasi;
- Dalam sistem demokrasi, sumber utama bagi legitimasi kekuasaan adalah pemilu ataupun pilkada yang berlangsung secara *fair* dan demokratis. Sumber legitimasi kekuasaan bisa juga bersifat nonelektoral, yakni pemilihan dan/atau pengangkatan publik yang didasarkan pada aturan main yang disepakati bersama, bisa dalam bentuk UU atau peraturan perundangan lainnya.

Memahami Masalah-masalah Politik

- Partai politik. Sejauh mana partai-partai politik merepresentasikan aspirasi dan kepentingan rakyat;
- Pemilu dan pilkada. Sejauh mana pemilu (pileg dan pilpres) dan pilkada menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan yang amanah dan bertanggung jawab;
- Parlemen nasional (DPR, DPD, MPR) dan daerah (DPRD). Sejauh mana kebijakan publik produk parlemen nasional dan daerah berorientasi kepentingan publik;
- Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sejauh mana pemerintah di semua tingkat melayani kepentingan publik, terutama yang terkait kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur);
- Demokrasi. Sejauh mana demokrasi yang berlaku melindungi hak-hak sosial ekonomi, hukum, dan politik semua warga negara tanpa kecuali secara setara, serta menjamin kebebasan sipil (kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, dll)

Masalah-masalah Politik Kontemporer

- Amandemen kelima konstitusi.
- Menghidupkan kembali GBHN.
- Menghidupkan kembali kewenangan MPR.
- Pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
- Pemilihan presiden melalui MPR.
- Penambahan dan pengurangan durasi masa jabatan presiden.
- Masalah-masalah di seputar Kabinet Indonesia Maju.
- Masalah koalisi dan oposisi.
- Masalah di seputar isu radikalisme.

Wassalam,
Terima kasih